

IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011

Oleh : Bambang Budi Legowo

Bambang Budi Legowo, 2012. IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011. Thesis (unpublished)

This research is conducted to describe and to find some factors facilitating and obstructing the implementation of National Program of Otonom Rural Community Empowerment (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) in Tanon Sub District, Sragen regency in the year of 2011. The program is intended to increase welfare and ability to find job especially for the poor. Fact shows, however, that the infrastructures are not maintained by the program implementer, high amount of economic budget at the sub district level is not made use. Theory advanced by Van Meter and Van Horn is applied in explaining the research problems. Descriptive qualitative method was used for describing in detail and depth the situation happened in the field. Purposive sampling using snowball sampling was used to select the respondents. Interactive analysis as suggested by Miles and Huberman was employed. To validate data, data triangulation method was used. Based on research result, data show that the implementation of the program was run well, however, it needs more socialisation of the program, consistency of the program, and to inform the rural people more detail so that people know the utilization of the program. Data also indicate that it is necessary to increase local people training.

Key words: National Program of Otonom Rural Community Empowerment; implementation.

Pendahuluan

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan selama (sebelum era otonomi daerah) ini cenderung bersifat dari atas ke bawah (Top down) yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam berbagai program. Program-program itu cenderung disusun dengan asumsi orang miskin belum mampu menolong dirinya sendiri, sehingga perlu bantuan dari pihak luar. Padahal orang miskin tersebut banyak mempunyai potensi dan kemampuan untuk

Program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah sejak orde baru ada program Bimbingan Masyarakat (Bimas), Kredit usaha kesejahteraan rakyat (Kukesra), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT) , Bantuan Langsung Tunai(BLT) , namun program-program tersebut belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sehingga sejak tahun 2007 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan yang dikendalikan langsung dibawah Menkokesra, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program ini merupakan penyempurnaan dan pengembangan serta kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dimulai sejak tahun 1999 dan selama ini dinilai berhasil.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk bisa keluar dari lingkaran ketidak berdayaan tersebut, masyarakat miskin sangat memerlukan bantuan. Dengan mengalokasikan dana disetiap kecamatan lokasi PNPM-Mandiri Perdesaan setiap tahunnya. Berdasarkan data Laporan Tahunan PNPM-Mandiri Perdesaan dari Badan KB PMD Kabupaten Sragen tahun 2011, Cukup banyak dana yang dialokasikan melalui PNPM-Mandiri Perdesaan, di Kabupaten Sragen Program ini dimulai sejak PPK tahun 2003 sebanyak 6 kecamatan lokasi dengan total alokasi dana sebesar Rp. 4.750.000.000,-, dan pada tahun 2008 bertambah satu kecamatan dengan total alokasi dana sebesar Rp. 9.250.000.000,-, pada tahun 2009 bertambah 6 kecamatan dengan total alokasi dana sebesar Rp. 21.600.000.000,- dan pada tahun 2010 bertambah lagi 5 kecamatan dengan total alokasi dana sebesar Rp. 29.250.000.000,-, dan pada tahun 2011 dengan total alokasi dana sebesar Rp. 21.650.000.000,-, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 18 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen dengan total dana sebesar Rp. 107.750.000.000,-.

Tinjauan Pustaka

Implementasi atau pelaksanaan merupakan usaha yang mendasar dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Sebaik-baiknya kebijakan bila tidak ada tindak lanjut/dilaksanakan maka kebijakan tersebut tidak akan mempunyai dampak yang berarti karena belum dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat. Menurut Uodji dalam Solichin Abdul Wahab (1991;45) mengatakan bahwa:

“the execution of policies is a important if not more than policy-making. Policies wil remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”

Pendapat lain menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1991; 51).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (1991; 51) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi merupakan proses pelaksanaan semua rencana kebijakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu program/kebijakan. Adapun contoh-contoh model implementasi program antara lain adalah sebagai berikut :

1) Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Keduanya berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses-proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud ada tiga kategori yaitu :

(1) Karakteristik masalah

(2) Struktur Manajemen program yang mencerminkan dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan (daya dukung peraturan)

(3) Faktor-faktor diluar peraturan

Meskipun keduanya mempunyai kerangka pemikiran yang sama tentang persoalan mendasar yaitu kebijakan dan lingkungan kebijakan, namun pemikiran kedua tokoh ini mengesankan bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini sering disebut sebagai model top down. Dengan asumsi tersebut, maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena ini merupakan standart evaluasi dan saran yang legal bagi birokrat pelaksana untuk mengarahkan sumber

daya. Kemudian pada tahap implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran juga harus mematuhi aturan program karena tujuan kebijakan tidak akan terlaksana tanpa adanya kepatuhan dari para birokrat pelaksana. Sekalipun demikian, diakui bahwa apa yang sering dilakukan oleh para pejabat adalah hal yang tidak dapat dihindari karena faktor lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karena itu dalam menempatkan pejabat di lapangan benar-benar ahli dalam pengerahan sumber daya dan berinisiatif untuk mengambil keputusan yang berguna untuk memodifikasi kebijakan (Wibawa, 1994:25)

2) Model Grindel

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Studi ini memperlihatkan adanya tiga dimensi analisis dalam organisasi yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan telah menjadi program maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi tidak berjalan mulus, tergantung implementability dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Siapa pelaksana program, Sumber daya apa yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn. Yang dimaksud oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; Karakteristik lembaga dan penguasa; Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Intensitas ketertiban para perencana, politik, penguasa, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektifitas implementasi (Wibawa, 1994:22-25).

3) Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Samodra W. et.all (1994: 19) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara senagaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antahubungan berbagai faktor. Menurut model ini suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaiannya standar dan sasaran tersebut. Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan tersebut adalah sasaran dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik

birokrasi pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik. Adapun apa yang dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn mengenai indikator yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan adalah :

1) Standart dan sasaran Kebijakan

Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian kinerja, maka standart dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret, misalnya berapa kali penyuluhan diadakan tiap minggu, berapa material yang harus dihabiskan untuk proses pembuatan barang tertentu, dan lain-lain . Sekalipun terlihat sederhana, penentuan standart dan sasaran seringkali bukan pekerjaan yang mudah, karena suatu kebijakan kadang-kadang memiliki tujuan yang luas dan kabur, seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, memperbaiki perekonomian penduduk di desa, dan sebagainya. Untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan oleh suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya iitu. Wawancara antara wartawan dengan seorang pejabat kadang-kadang menghasilkan informasi yang berharga tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Dapat juga evaluator menggunakan standart atau kriteria yang telah dipakai secara luas oleh kalangan akademis.

2) Sumber daya.

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia oleh pemerintah secara memadai. Persoalannya adalah berapakah dana minimal yang harus tersedia untuk mengimplementasikan suatu kebijakan? Dalam perspektif ini evaluator dapat menguji efisiensi dari implementasi kebijakan yang dikaji.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan Aktivitas

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan suatu program, karena komunikasi merupakan sarana koordinasi antara sesama aparat pelaksana maupun antara aparat pelaksana dengan masyarakat khususnya kelompok sasaran dan juga untuk menyamakan pemahaman dan persepsi antara aparat pelaksana dengan apa yang menjadi tujuan program. Kejelasan standart dan sasaran tidak menjamin implementasi bisa efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi atau antar pelaku kebijakan. Semua pelaksana kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya mnejadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi merupakan suatu proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini menyangkut persoalan kewewenangan dan kepemimpinan.

Secara garis besar, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi mendatar dan komunikasi vertikal, komunikasi mendatar ini terjadi antar aparat untuk mengkoordinasikan tugas dan peranan agar tidak terjadi overlapping tugas-tugas atau kekosongan perhatian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan program. Komunikasi mendatar juga dapat terjadi antar kelompok sasaran. Komunikasi vertikal, komunikasi vertikal terjadi antar atasan dengan bawahannya, yang meliputi : 1. Kejelasan aparat pelaksana dalam memberikan perintah, petunjuk, maupun teguran kepada bawahannya. 2. Kejelasan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam menerima program. 3. Kesempatan masyarakat dalam mengajukan pendapat, keluhan maupun saran kepada aparat pelaksana. 4. Kesiediaan aparat pelaksana untuk menerima pendapat, keluhan, maupun saran dari masyarakat.

Karakteristik Organisasi

Struktur birokrasi pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan, yang potensial maupun aktual, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Karakteristik organisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing satuan organisasi atau individu-individu yang ada di dalamnya dapat bekerja sesuai dengan peranan dan wewenangnya.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Merupakan variabel dapat mempengaruhi kinerja kebijakan, karena proses kebijakan akan dapat berjalan lancar bila kondisi sosial mendukung, misalnya semangat masyarakatnya acuh-tak-acuh terhadap kebijakan publik, atau masyarakatnya pemalas, suka mabuk. Untuk kondisi ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan, misalnya adanya semangat ikut berpartisipasi untuk memberikan swadaya. Demikian pula kondisi politik juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan, misalnya adanya kekuatan politik yang menolak kebijakan dengan alasan politik, atau adanya kelompok kepentingan yang menolak kebijakan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana yang mendukung suatu pelaksanaan kebijakan maka akan memberikan loyalitasnya dengan tujuan agar kebijakan tersebut berhasil. Sikap pelaksana yang mendukung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dalam memahami tujuan kebijakan. Hal tersebut dapat terlihat dari kepatuhannya menaati persedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana merupakan elemen penting kebijakan karena pelaksanalah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu pelaksana harus dapat memahami, mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, diantaranya adalah :

a. Sikap pelaksana (diadopsi dari Van Meter dan Van Horn)

Sikap pelaksana yang mendukung suatu pelaksanaan program maka akan memberikan loyalitasnya dengan tujuan agar program tersebut berhasil. Sikap pelaksana yang mendukung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dalam memahami tujuan program. Hal tersebut dapat terlihat dari kepatuhannya menaati persedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana merupakan elemen penting program karena pelaksanalah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu pelaksana harus dapat memahami, mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Kondisi, netralitas, dan obyektifitas pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respon pelaksana. Kejelasan tujuan dan karakteristik organisasi akan mempengaruhi sikap dan loyalitas pelaksana terhadap organisasi. (Wibawa, 1994:21).

a) Komunikasi (diadopsi dari Van Meter dan Van Horn)

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan suatu program, karena komunikasi merupakan sarana koordinasi antara sesama aparat pelaksana maupun antara aparat pelaksana dengan masyarakat khususnya kelompok sasaran dan juga untuk menyamakan pemahaman dan persepsi antara aparat pelaksana dengan apa yang menjadi tujuan program. Kejelasan standart dan sasaran tidak menjamin implementasi bisa efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi atau antar pelaku kebijakan. Semua pelaksana kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya mnejadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi merupakan suatu proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini menyangkut persoalan kewewenangan dan kepemimpinan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan melalui kegiatan pendampingan maupun pelatihan-pelatihan yang semuanya ditujukan untuk memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat. Agar masyarakat mempunyai kemandirian dalam mengambil keputusan untuk membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara mandiri.

PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan perekonomian di desa-desa, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya masyarakat, salah satu tujuan dari PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu menumbuhkan perekonomian di pedesaan maka PNPM-Mandiri Perdesaan menyalurkan pemberian bantuan pinjaman permodalan bagi usaha-usaha kecil di pedesaan.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya penurunan angka jumlah rumah tangga miskin di suatu wilayah,

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dimana studi kasusnya mendiskrepsikan secara mendalam mengenai kondisi apa adanya di lapangan studi. Secara teoritis, menurut Moleong (2001 : 5)

“Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan; Pertama, penyesuaiannya lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi”.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan informan dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* (penentuan informan sudah jelas). Adapun informan yang akan dipilih sebagai informan awal (*key informan*) adalah PJOK (Penanggung-jawab Operasional Kegiatan) karena mereka dianggap paling bertanggung-jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Tanon, selanjutnya adalah Fasilitator Kecamatan, Pengurus UPK, di tingkat desa yaitu KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), Perangkat Desa, dan beberapa orang/masyarakat pengguna/menerima manfaat maupun orang/masyarakat desa yang tidak/belum terlibat langsung dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah desanya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai

obyek penelitian. Analisis terdiri dari Reduksi Data, Display Data, Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian

Secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik. Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal yang lebih penting dan harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi wilayah dimasing-masing desa, dan sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan setiap saat atau setiap kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan (pengajian, yasinan, persekutuan gereja, dan lain-lain), pertemuan adat istiadat (gotong royong, arisan, upacara adat dan lain lain) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran, tabloit, brosur/famplet, serta media elektronik, seperti radio, televisi, maupun internet, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelanjutan dari PPK (Program Pengembangan Kecamatan) diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon dilaksanakan melalui proses yang sistematis, dengan kejelasan visi, misi yang mengarah terwujudnya tatanan masyarakat mandiri. Sehingga dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan melalui tahapan sosialisasi, penggalan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemeliharannya tetap menggunakan azas yang dianut PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu “Dari, Oleh, Untuk, Masyarakat (DOUM)” yang secara rinci terdiri dari :

- a) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penggalan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;

- b) Memberikan kepercayaan untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan dan tanpa intervensi dari berbagai pihak;
- c) Berpihak pada Rumah Tangga Miskin (RTM);
- d) Memberikan akses sebebaskan-bebasnya kepada masyarakat;
- e) Mengutamakan sumberdaya manusia/alam lokal;
- f) Mendorong suasana kompetisi sehat dalam pengajuan kegiatan;
- g) Dan penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.

Langkah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Masyarakat desa yang dapat bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (paralel) atau menerus, seperti antara lain pemantauan dan pendampingan. Kelompok kegiatan tersebut dapat dipilah menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

- a) Proses Perencanaan
- b) Proses Pelaksanaan
- c) Proses Pemeliharaan

Untuk melihat gambaran lengkap terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2011, berikut penjelasan pelaksanaannya secara bertahap sebagai berikut :

Dalam proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan tahapan yang harus dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terdiri dari :

Penyusunan rencana kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, sampai pada Musyawarah Desa (Musdes) Informasi. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, sampai dengan Pelatihan pada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Untuk perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalan gagasan sampai dengan Musdes Perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD), setelah mendapatkan rancangan kegiatan pembangunan desa, maka selanjutnya sebagian dijadikan kegiatan desa untuk diusulkan ke tingkat kecamatan. Perencanaan di tingkat kecamatan dimulai dari MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Sedangkan untuk kegiatan di kabupaten adalah kegiatan untuk memfasilitasi ketersediaan dana/anggaran pendampingan (cost sharing) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kegiatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat sebagai pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk kegiatan perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari : sosialisasi, Penggalan Gagasan, Musyawarah Perencanaan, Verifikasi Usulan, dan Prioritas Usulan

Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di tingkat kecamatan yaitu saat Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD ke 1) dan di tingkat desa yaitu pada saat Musyawarah Desa Sosialisasi (Musdes ke 1). Baik MAD maupun Musdes digunakan untuk sosialisasi program PNPM Mandiri Perdesaan, baik mengenai tujuan, manfaat, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

MAD Sosialisasi di kecamatan sendiri diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011, bertempat Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Tanon, yang dihadiri oleh 16 desa, dan masing-masing desa mewakilkan 10 orang yang terdiri Kepala Desa dan aparat desa, wakil RTM, wakil kaum perempuan, LSM, Tokoh masyarakat/agama, dan masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Materi sosialisasi ini adalah tentang petunjuk umum dan petunjuk teknis mengenai PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua UPK Kecamatan Tanon, Hartawan, SAg. :

“Tahap pertama PNPM Mandiri Perdesaan diawali dengan diadakan musyawarah antar desa, yang diadakan pada tanggal 10 Februari 2011, yang dihadiri oleh aparat desa dari 16 desa yang ada di kecamatan tanon ini dan masing-masing desa sebanyak kurang-lebih 10 orang. Dan selanjutnya di masing-masing desa segera disusun jadwalnya sekaligus pada saat MAD itu dengan maksud agar bisa dihadiri oleh pelaku tingkat kecamatan.” (wawancara tanggal 12 Juni 2012).

Untuk materi sosialisasi di tingkat desa berkisar tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari Tujuan, Visi Misi, serta mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya dengan Fasilitator Kecamatan :

“MAD dan Musdes Sosialisasi memang dilaksanakan sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat, jadi memang sedikit terkesan penyampaian informasi satu arah. Selain itu dikarenakan waktu pelaksanaan masing-masing desa hanya satu hari, jadi sosialisasi ini sedikit kurang mengena, namun dirasa sudah cukup bagus.” (wawancara tanggal 12 Juni 2012).

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh TKP desa Kecik Kecamatan Tanon :

“Sosialisasi yang diadakan pada tanggal 16 Pebruari 2011 di desa ini memang hanya sebatas pengenalan tentang PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. Dikarenakan waktu sosialisasi yang hanya 1 haru, jadi informasi yang perlu disampaikan dirasa kurang lengkap.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Selain digunakan untuk sosialisasi, musyawarah desa juga digunakan untuk memilih perwakilan masyarakat guna menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan di setiap desa. Disini juga dipilih Fasilitator Desa (FD) yang nantinya akan memfasilitasi atau memandu masyarakat desa dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan maupun pemelirahaannya.

Setelah terlaksananya sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan maupun tingkat desa selanjutnya dilaksanakan Musdes penggalian gagasan/usulan. Musyawarah ini merupakan pertemuan di tingkat dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama dari Rumah Tangga Miskin (RTM). Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan.

Setelah musyawarah dusun penggalian gagasan dan menghasilkan usulan-usulan dari setiap dusun yang ada dalam satu desa, maka selanjutnya diadakan musyawarah desa untuk menentukan usulan mana yang akan menjadi usulan desa, yang selanjutnya akan diajukan ke tingkat kecamatan (MAD Perencanaan). Selain pencarian gagasan di tingkat dusun, dilaksanakan juga penggalian gagasan khusus untuk perempuan di tingkat desa. Musyawarah khusus perempuan (MKP) ini dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kegiatan desa. Usulan yang disampaikan dalam MKP ini juga perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilaksanakan ditingkat dusun sebelumnya. Usulan dari MKP ini juga akan diteruskan ke tingkat kecamatan (MAD Perencanaan). Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua TPK Desa Kecik dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Tiap-tiap desa mengadakan musyawarah untuk menentukan usulan yang nantinya akan diusung sebagai usulan dusun pada musyawarah desa perencanaan. Musdus ini dulu diadakan

dirumah saya dan dihadiri oleh lebih dari 40 orang perwakilan masyarakat.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara TPK desa padas yang menyatakan sebagai berikut :

“Dirumah pak Kadus sini, dulu diadakan musyawarah untuk dusun sini guna menentukan usulan kegiatan yang mau diajukan untuk didanai program PNPM, sampai dua kali pertemuan musyawarah untuk dapat disetujui pembangunan jalan rabat beton sebagai usulan yang akan diajukan dusun sini untuk menjadi usulan desa.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Setelah ada gagasan dari setiap dusun dan MKP sudah tersusun, maka selanjutnya diadakan Musdes Perencanaan yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil usulan dari masing-masing dusun ini akan dibahas dalam musdes sehingga tinggal menghasilkan tiga (3) usulan kegiatan desa yang akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Seperti yang dikemukakan oleh ketua TPK Desa Kecik Kecamatan Tanon, sebagai berikut :

“Pada musdes perencanaan yang telah dilaksanakan di Balai Desa pada bulan April 2011 lalu, dipilih 3 usulan dan 6 usulan dusun untuk menjadi usulan desa. Usulan yang terpilih menjadi usulan desa adalah SPP, dan Jalan Rabat Beton, PMT untuk posyandu.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua TPK Desa Padas Kecamatan Tanon, sebagai berikut :

“Dari banyak usulan dari beberapa dusun yang ada dipilih dua (2) usulan sebagai usulan desa pada PNPM Tahun 2011. Usulan yang terpilih adalah SPP dan jalan Rabat Beton. Musdes Perencanaan PNPM Tahun 2011 di desa Padas ini terlaksana sekitar bulan April 2011.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Usulan dari desa diperiksa dan dinilai kelayakannya untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sebanyak 5 orang yang memiliki keahlian sesuai dengan usulan kegiatan

Berkaitan dengan usulan yang telah disepakati dalam MAD Perencanaan itu, maka untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap usulan tersebut dibentuklah Tim Verifikasi Kecamatan. Selanjutnya Tim tersebut menindaklanjuti dengan membuat

rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh FK Kecamatan Tanon, sebagai berikut :

“Setelah terkumpul usulan-usulan desa, selanjutnya usulan-usulan tersebut diverifikasi oleh Tim Verifikasi, guna melihat kelayakan dan tingkat urgency usulan yang nantinya digunakan untuk menentukan apakah usulan tersebut layak untuk didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan atau tidak.” (wawancara tanggal 12 Juni 2012).

Hal senada juga dikemukakan oleh Bendahara TPK Desa Kecik Kecamatan Tanon, sebagai berikut :

“Setelah usulan-usulan desa dibawa ke kecamatan, nantinya dari kecamatan akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Verifikasi. Baik dari segi kelayakan usulan dan tingkat urgency usulan tersebut. Kalau usulan tersebut layak dan urgen, maka usulan tersebut akan dapat didanai PNPM Mandiri Perdesaan.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012)

Dari hasil Tim Verifikasi di tingkat kecamatan ditentukan peringkat usulan kegiatan dari desa-desa. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan. Dalam MAD prioritas usulan ini dimaksudkan untuk mengurutkan usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing desa dengan melihat kemanfaatan dan tingkat urgency dari usulan tersebut. Dari urutan tersebut akan menentukan usulan apa saja yang mendapat pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh FK kecamatan Tanon, seperti berikut :

“Dana PNPM Mandiri Perdesaan kan terbatas, jadi tidak semua usulan dari desa diterima begitu saja dan didanai. Usulan-usulan dari desa ditampung dan diverifikasi untuk nantinya dapat ditentukan urutan prioritas usulan-usulan tersebut. Usulan yang nantinya akan didanai harus dilihat dari prioritas dan tingkat kemanfaatan untuk masyarakat banyak.” (wawancara tanggal 12 Juni 2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara UPK Kecamatan Tanon, seperti berikut :

“jadi usulan-usulan dari desa itu akan diverifikasi dulu oleh Tim Verifikasi dan nantinya kalau usulan tersebut oleh Tim Verifikasi setuju untuk didanai maka usulan tersebut menjadi prioritas usulan, hal ini dilihat dari kemanfaatan bagi masyarakat banyak terutamanya masyarakat miskin.” (wawancara tanggal 12 Juni 2012).

Berkaitan dengan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, para informan yang diwawancarai oleh peneliti memberikan pernyataan yang senada, bahwa semua

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah diselesaikan semua sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Kecik Kecamatan Tanon sebagai berikut :

“Menurut pengamatan kami semua kegiatan PNPM tahun anggaran 2011 di wilayah desa Kecik dan mungkin di desa lainnya juga telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ada dan diselesaikan dengan baik.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012).

Demikian juga pernyataan dari Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon sebagai berikut :

“Kalau untuk semua kegiatan PNPM tahun 2011 di wilayah desa Padas telah selesai dan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ada.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

Sedangkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanon juga memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan dari Kepala Desa Kecik tersebut sebagai berikut :

“Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kecik pada tahun 2011 telah berjalan seratus persen dan selesai.” (wawancara tanggal 11 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa-desa di wilayah Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Dalam hal pertanggungjawaban kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini, peneliti hanya mengulas bagaimana mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, serta penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut oleh pelaku di desa. Pada tahap ini, proses pelaksanaan kegiatan mulai pencairan dana tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap terakhir 20% sudah selesai, sehingga teruskan dengan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggung-jawaban penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan 100%. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Padas Kecamatan Tanon sebagai berikut :

“Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, dan pencairan dana sudah seratus persen, maka langsung diadakan Musdes Pertanggung-jawaban oleh pengurus TPK.” (wawancara tanggal 11 Juli 2012).

Apabila masing-masing desa yang mendapat alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan sudah pada selesai melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggung-jawaban, maka selanjutnya di tingkat kecamatan oleh pengurus UPK mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD)

Pertanggung-jawaban. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Hartawan, Sag. Selaku Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanon sebagai berikut :

“Setelah semua desa yang mendapatkan alokasi dana PNPM melaksanakan Musdes pertanggung-jawaban, maka kami selaku UPK segera melaksanakan MAD Pertanggung-jawaban, dan di Tanon ini telah kami laksanakan pada tanggal 28 Januari 2012.” (wawancara tanggal 12 Juli 2012).

Dalam hal pertanggung-jawabnya ini peneliti mengamati beberapa kegiatan mulai dari :

a. Alur Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan penyaluran dana dilakukan melalui kantor Pos/Bank pemerintah, baik dana dari Tingkat Kabupaten ke Kecamatan maupun dana dari tingkat kecamatan ke tingkat desa, hal ini dimaksudkan agar untuk menjamin keamanan dana. Untuk dana dari tingkat kabupaten ke UPK Kecamatan Tanon memanfaatkan Rekening di Bank Jateng Cabang Sragen melalui Bank Jateng Cabang Pembantu Gemolong, sedangkan dana dari tingkat kecamatan ke desa-desa yang mendapat alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan semuanya menggunakan Bank BKK Kecamatan Tanon.

Pemilihan rekening BKK ini merupakan pilihan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD 3). Hal ini seperti disampaikan oleh Bendahara UPK Kecamatan Tanon dalam wawancara dengan peneliti di kantor UPK:

“Untuk penyaluran dana ke TPK semua desa menggunakan rekening Bank BKK Kecamatan Tanon seperti apa yang telah ditetapkan dalam MAD Penetapan Usulan.” (wawancara tanggal 12 Juli 2012).

b. Proses Penyaluran dana secara bertahap

Setelah ada pengajuan/permintaan pencairan dana dari desa (TPK) yang dilampiri dengan RAB dari kegiatan yang akan dilaksanakan, maka UPK akan segera mencairkan/menyalurkan dana sebesar 40% dari anggaran yang didapat untuk pelaksanaan kegiatan melalui rekening bank yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa (Musdes). Setelah dana tersebut digunakan selanjutnya TPK bisa mengajukan pencairan 40% tahap kedua dengan persyaratan melampirkan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana, selanjutnya UPK akan menyalurkan dana tahap kedua. Dan setelah dana tahap kedua digunakan dan dapat mempertanggung-jawabkan penggunaannya, maka TPK bisa menyalurkan

dana tahap ketiga sebesar 20%. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bendahara UPK Kecamatan Tanon seperti berikut :

“Untuk pencairan dana ke desa secara bertahap, tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%, sesuai ketentuan dalam PTO yang berlaku.” (wawancara tanggal 12 Juli 2012).

c. Laporan Penggunaan dana

Setiap dana yang telah disalurkan ke desa/TPK harus dipertanggung-jawabkan dengan baik dan dibuat laporan secara lengkap dan tertib, selanjutnya laporan dikirim ke UPK Kecamatan untuk dicermati, dan verifikasi. Dan selanjutnya Fasilitator Teknik akan melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana yang telah dibangun. Setelah semua desa selesai melaksanakan kegiatan PNPM maka selanjutnya di tingkat kecamatan oleh UPK diselenggarakan Musyawarah Antar Desa Pertanggung-jawab UPK. Demikian seperti yang disampaikan oleh Bendahara UPK Kecamatan Tanon sebagai berikut :

“Untuk pencairan dana ke desa secara bertahap, demikian halnya untuk pelaporan penggunaannya, tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%, sesuai ketentuan dalam PTO yang berlaku.” (tanggal 12 Juli 2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan Tanon sebagai berikut:

“Setelah semua desa selesai melaksanakan kegiatan PNPM, maka di kecamatan segera dilaksanakan MAD Pertanggung-jawaban.” (wawancara 12 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa setiap ada pencairan dana maka akan selalu ada pertanggung-jawabannya dalam bentuk laporan penggunaan dana.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi PNPM-Mandiri Perdesan di Kecamatan Tanon.

Standart dan Sasaran Kebijakan

Untuk standart dan sasaran kebijakan secara nasional telah tertuang dalam surat Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI nomor : B.201/MENKO/KESRA/X/2010 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan T.A.2011, jo Surat dari Kemendagri, nomor 414.2/0012 /PMD, tanggal 05 Januari 2011 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM-MP TA. 2011, dan Petunjuk Teknis Operasional, maupun

Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2011. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Penanggung-jawab Operasional dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Sebagai ketentuan umum yang digunakan adalah PTO terbaru dan Petunjuk Penggunaan Anggaran PNPM yang terbaru, karena disana ada tujuan/sasaran yang harus dicapai dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan. Dan sarasannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (masyarakat miskin).” (wawancara tanggal 5 Juni 2012).

Sumberdaya

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon selalu memanfaatkan/mengutamakan sumberdaya lokal (baik para pelaku, maupun material). Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh pelaku di tingkat desa (bendahara TPK desa Kecik) sebagai berikut:

“Untuk kebutuhan material seperti batu, pasir, kayu, genteng sudah tersedia banyak di desa.” (wawancara tanggal 5 Juni 2012).

Komunikasi antar organisasi/pelaku dan penguatan aktifitas

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui moderator. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi adalah pada kegiatan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi adalah antara lain:

a) Intensitas Komunikasi/Sosialisasi

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara pelaku kebijakan dengan pelaksana kebijakan dilapangan, diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah diadakan sosialisasi mengenai PNPM-Mandiri Perdesaan dan ada pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai PNPM- Mandiri Perdesaan. Pernyataan dari Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Ir. Jumikan, terkait dengan sosialisasi PNPM- Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa :

“Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan telah dilaksanakan oleh Tim dari Kabupaten Sragen yang diikuti oleh Camat, Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon, PJOK, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), para Kepala Desa, BPD, LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK masing-masing desa.” (wawancara tanggal 05 Juni 2012).

b) Komunikatif (kejelasan komunikasi)

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan sangatlah penting/berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berikut dijelaskan oleh salah seorang warga desa Kecik, Kecamatan Tanon yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi, yaitu :

“Untuk masalah penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, kami tidak mengalami kesulitan karena sudah jelas penggunaannya.” (wawancara tanggal 5 Juni 2012).

c) Konsistensi pesan

Sementara itu ketika dinyatakan tentang konsistensi penyampaian pesan, salah seorang pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan di desa Kecik Kecamatan Tanon (ketua TPK) memberikan pernyataan berikut :

“Kami merasa tidak ada yang tumpang tindih penjelasan Tim Kabupaten dengan ketentuan yang ada. Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah kami patuhi semua, hal itu dikarenakan sosialisasi sangat jelas dan juga sesuai dengan penjelasan dari Bapak Camat.” (wawancara tanggal 6 Juni 2012).

Karakteristik Organisasi

Dalam hal karakteristik organisasi, struktur birokrasi pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana PNPM-Mandiri Perdesaan ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

a) Pembentukan Struktur Organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon sebagaimana telah disampaikan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Tanon berikut ini :

“Untuk struktur organisasi PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanon ini sudah ada sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO), sebagai Penanggung Jawab Program adalah bapak camat, saya sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ada BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), Pengurus UPK, BP UPK, Tim Verifikasi dan Pendamping Lokal (PL) itu yang di tingkat kecamatan.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

b) Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan para informan memberikan pernyataan yang sedana. Adapun pernyataan Bendahara UPK sebagai berikut :

“Menurut saya sudah jelas untuk pembagian tugas yang ada di UPK, seperti tugas sekretaris jelas untuk melaksanakan administrasi kegiatan UPK, bendahara untuk melaksanakan/melayani kegiatan/transaksi keuangan dan sekaligus administrasi keuangan.” (wawancara tanggal 9 Juni 2012)

c) Koordinasi Para Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan disampaikan dalam pernyataan Ketua TPK di Desa Kecik Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, berikut:

“Dari pemerintah desa Pak Carik atas perintah Pak Kepala Desa memerintahkan kepada Bendahara TPK untuk melaksanakan administrasi/SPJ yang tertib dan teratur.” (wawancara tanggal 7 Juni 2012)

Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Dukungan Masyarakat merupakan kondisi sosial,ekonomi, politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Dukungan masyarakat Kecamatan Tanon terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berantusias tinggi, hal ini terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat, baik yang berupa tenaga kerja, material, maupun sumbangan pemikiran.

Adapun indikator kondisi sosial, ekonomi, politik yang diamati adalah :

a) Berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat, dan bagaimana pendapat masyarakat terhadap kebijakan sangatlah mendukung, hal ini seperti yang disampaikan oleh seorang warga Desa Kecik Kecamatan Tanon yang mengatakan sebagai berikut :

“Ya warga desa sini sangat senang dengan adanya PNPM ini karena desanya bisa membangun, baik jalan, jembatan, ada sekolahan, dan juga untuk pinjaman modal untuk usaha.” (wawancara tanggal 7 Juni 2012)

b) Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Tanon sangat berpotensi untuk dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen tahun 2010 menunjukkan

bahwa pendapatan per kapita untuk Kecamatan Tanon sebesar Rp. 285.450,25 di bawah rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Sragen sebesar Rp. 290.553,17

c) Dan yang berkaitan dengan Politik yang ada di wilayah Tanon, selama ini tidak ada kelompok kepentingan, Elit politik dan kelompok swasta menentang kebijakan. Hal seperti ini disampaikan oleh Penanggung-jawab Operasional Kegiatan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk kegiatan PNPM disini lancar-lancar saja, tidak pernah ada yang menghambat kegiatan, para kader politik semuanya setuju terhadap pelaksanaan PNPM, dan bahkan mereka sanggup memberikan dorongan kepada masyarakat di wilayah desanya masing-masing.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

Sikap Pelaksana

Dalam sikap pelaksana ini dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelestarian, Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan kali ini pihak pelaksana yaitu Penanggung-jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknis (FT), Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), Pendamping Lokal (PL), dan para pelaksana di tingkat desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dapat dikatakan sudah berperan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan sampai tahap pelestarian. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Hartawan, Sag. (Ketua UPK) :

“Untuk tahapan PNPM di Kecamatan Tanon ini kami laksanakan sesuai dengan juklak yang ada, dan sama hal di tingkat desa semua desa se Kecamatan Tanon ini melaksanakan tahapan PNPM sesuai dengan juklak.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

a) Persepsi Pelaksana

Berkaitan dengan persepsi pelaksana terhadap PNPM Mandiri Perdesaan seperti disampaikan ketua UPK sebagai berikut:

“Saya berharap PNPM Mandiri Perdesaan di tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat, saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Kecamatan Tanon akan memiliki persepsi yang sama terhadap PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya semakin ditingkatnya.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

b) Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, dari informan memberikan pernyataan yang sama. Adapun pernyataan dari Bendahara TPK desa Kecik bahwa adanya respon pelaksana terhadap Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :

“Pak Lurah sangat respon terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, setelah dana PNPM cair pak lurah segera memerintahkan kepada ketua TPK untuk segera melaksanakan kegiatannya.” (wawancara tanggal 10 Juli 2012).

c) Tindakan Pelaksana

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan telah membuat kegiatan dan langkah-langkah tindakan, sebagaimana pernyataan FK Kecamatan Tanon sebagai berikut :

“Dana PNPM Mandiri Perdesaan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pembangunan fisik antara lain untuk jalan rabat beton, talut jalan dan untuk kegiatan peningkatan kualitas hidup yang berupa bantuan PMT di Posyandu, dan untuk kegiatan ekonomi simpan pinjam khusus kelompok perempuan atau yang disingkat SPP.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

Daftar Pustaka

- Arikuntono, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta : UPP MP YKPN.
- Arsiad, Lincolin, 2007, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ali, Muhammad. 2005, *Statistik Penelitian*. Yogyakarta : BPFE.
- Badan KBPMD Kabupaten Sragen. 2011, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. 2010, *Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010*.
- Bayo Ala, Andre. 2005, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Emanuel Hakim. 2003. *Sudut Pandang Kebijakan dan Pembangunan Negara*. Semarang : PT. Dhalia Indonesia.
- H.B, Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press : Surakarta.
- Kartosasmito, Ginanjar. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat , Jurnal Studi Pembangunan*. ITB Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Moeljarto. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Moelong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revised Ed)*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2002. *Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Bandung : CV. Karisma.
- Nurhadi. 2007. *Mngembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Prayitno, Hadi. 2005. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta : LIBERTY.
- Ronny. Hanitiyo. 2005. *Metode Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sahdan. Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat*. <http://www.jurnalekonomirakyat.com> 92 : Agustus.
- Salim. Emil. 2007. *Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Pendapatan*. Jakarta: ysayasan Idayu.
- Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Perdesaan. 2010. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Umar, Husien. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber lain :

- Keputusan Bupati Sragen. Nomor: 414.2/50-20/2011, Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen T.A. 2011.
- Surat Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI nomor : B.201/MENKO/KESRA/X/2010 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan T.A.2011